

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterlibatan peran perempuan dalam dunia politik bukan merupakan jalan yang mudah ditengah berkembangnya nilai - nilai patriarki yang dianut masyarakat. Kemapanan kultural patriarki yang ada telah menjadi ideologi dalam kehidupan politik yang sukar untuk dilebur. Ideologi kultur patriarki yang mengkotak-kotakkan peran dalam arena perempuan dan laki-laki memunculkan unsur ketidakadilan. Unsur ketidakadilan tersebut dapat terlihat dalam bidang parlemen yaitu pemberian kuota terhadap perempuan yang dibatasi 30 persen dari jumlah anggota parlemen secara keseluruhan, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD. (Anonim, 2014. <http://www.esquire.co.id/article/2014/3/368-keterwakilan-politik-perempuan>).

Dominasi budaya patriarki memang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari kebiasaan di keluarga yang memahulukan suami untuk lebih dahulu mengambil makan daripada seorang istri. Peran ayah sebagai kepala keluarga yang mendapat posisi paling utama dalam organisasi keluarga. Pada akhirnya kebiasaan – kebiasaan yang lebih memahulukan laki- laki ini, turut mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai sosok yang berhak dijadikan pemimpin dalam ranah pemerintahan.

Persepsi masyarakat mengenai sosok yang berhak memimpin selalu identik dengan laki – laki. Artinya, dalam sosial masyarakat, perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan dibandingkan rasionalitas. Kontruksi yang demikian membuat masyarakat berpikir bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang tak berdaya dalam menguasai sesuatu, termasuk dalam hal memimpin.

Kepemimpinan perempuan di Indonesia dulu memang dianggap tabu oleh masyarakat, bahkan adanya sikap penolakan dari masyarakat terhadap

keberadaan pemimpin perempuan. Sikap penolakan ini dapat kita cermati ketika naiknya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Megawati ditolak untuk diangkat sebagai presiden meskipun sebenarnya dia merupakan pemimpin partai dan pemenang pemilu. Penolakan terhadap Megawati sebagai presiden menggunakan berbagai alasan yang tidak masuk akal bahkan menggunakan dalil – dalil agama yang dipolitisir untuk menghambat naiknya Megawati untuk duduk di kursi presiden.

Namun, seiring dengan kemajuan zaman, pandangan tersebut mulai bergeser. Pandangan bahwa perempuan hanya perlu di rumah dan tidak perlu terlibat dalam urusan politik, mulai berganti dengan terbukanya ruang bagi keterlibatan peran perempuan untuk ikut serta menyumbangkan pemikirannya dalam berbagai bidang kehidupan. Keadaan lain yang turut mendukung keikutsertaan peran perempuan dalam berbagai bidang adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta proses globalisasi yang pesat. Keadaan ini membawa berbagai perubahan yang mendasar dalam segala aspek kehidupan. Tantangan kemajuan dan globalisasi tersebut mengharuskan kita melihat peranan perempuan dan laki – laki dalam satu tatanan kemitrasejajaran yang saling mengisi.

Dalam kehidupan bernegara sebenarnya perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki – laki. Hal tersebut termuat dalam Pasal 27 UUD 1945, bahwa wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria, dalam bidang hukum dan pemerintahan. Di dalam perundang – undangan politik yang tertera dalam UUD 1945 tersebut, telah tercermin bahwa wanita dan pria sama – sama memiliki hak untuk dipilih dan memilih.

Pernyataan ini dapat dibenarkan, jika melihat kenyataan yang ada di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Di daerah ini merupakan sebuah desa yang memiliki kepala desa perempuan. Keberadaan pemimpin perempuan sebagai kepala desa di desa ini bukanlah kali pertama terjadi. Dulunya kedudukan perempuan sebagai kepala desa di Desa Ngudikan juga pernah terjadi dengan periode masa jabatan yang lama yaitu dari tahun 1989 hingga tahun 2006 (Buku Profil Desa Ngudikan, 2016).

Selama ini fenomena yang banyak ditemukan dalam masyarakat mengenai keberhasilan perempuan untuk menjabat sebagai seorang pemimpin dipengaruhi oleh garis keturunan atau faktor pernikahan. Seperti keberhasilan seorang kepala desa perempuan yang memenangkan surat suara dari masyarakat saat pemilihan umum, karena merupakan anak dari kepala desa sebelumnya. Faktor pernikahan, seperti terpilihnya istri kepala desa yang sebelumnya menjabat saat pemilihan umum.

Namun hal ini berbeda dengan keberhasilan kepala desa perempuan di Desa Ngudikan yang sekarang ini menjabat. Keberhasilan kepala desa perempuan ini dalam menduduki kursi kepemimpinan pemerintahan desa, tidak disertai dengan adanya latar belakang anggota keluarga yang pernah menjabat sebagai kepala desa. Meski keberadaan perempuan sebagai kepala desa di Desa Ngudikan, bukanlah pertama kali terjadi, namun yang membuat berbeda antara kepala desa perempuan yang sekarang dengan kepala desa perempuan yang terdahulu adalah latar belakang faktor keluarga. Jika kepala desa perempuan yang terdahulu merupakan anak dari kepala desa yang sebelumnya menjabat. Sedangkan terpilihnya kepala desa perempuan yang sekarang masih menjabat tidak dipengaruhi oleh keberadaan latar belakang anggota keluarga yang pernah menjabat sebagai kepala desa.

Keberhasilan kepala desa perempuan dalam memenangkan pemilu saat pemilihan kepala desa dan tidak adanya pengaruh latar belakang keberadaan anggota keluarga sebagai kepala desa, turut mengubah persepsi umum mengenai keberhasilan seorang kepala desa perempuan yang berhasil terpilih selalu dipengaruhi oleh keberadaan anggota keluarganya dalam kursi pemerintahan desa.

Keberadaan pemimpin perempuan di wilayah ini, mampu membuktikan bahwa perempuan juga mampu berperan sebagai pemimpin. Selain itu hal ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat di Desa Ngudikan telah memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menjabat sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa.

Melihat kenyataan yang ada menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai modal keberhasilan terpilihnya kepala desa perempuan dalam menduduki kursi kepemimpinan dalam lembaga pemerintahan desa. Seperti yang diketahui untuk mampu menduduki kursi kepemimpinan, bukanlah suatu hal yang mudah dan tentunya membutuhkan banyak faktor pendukung sebagai modalnya. Modal yang dibutuhkan tidak hanya berupa materi namun juga modal – modal lainnya. Dari persoalan ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian sebagai judul skripsi dengan judul penelitian: Pemenangan Kepala Desa Perempuan Di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apa modal ibu Dami Astutik dalam memenangkan pilihan masyarakat sebagai kepala desa perempuan di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk?
- 1.2.2 Bagaimana strategi Ibu Dami Astutik menggali modal yang di miliki untuk menarik dukungan masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui modal yang mendukung terpilihnya ibu Dami Astutik sebagai kepala desa perempuan desa di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.
- 1.3.2 Mengetahui strategi ibu Dami Astutik dalam menggali modal yang dimiliki untuk menarik dukungan dari masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Semoga hasil penelitian ini dapat menambah khazanah perpustakaan prodi sosiologi sekaligus sebagai rujukan bahan penelitian mengenai kepemimpinan perempuan. Sekaligus mampu menjadi acuan yang relevan dalam pemahaman teori modal Pierre Bourdieu bagi mahasiswa sosiologi.

1.4.2 Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai kemenangan terpilihnya kepala desa perempuan di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, serta mampu menjadi inspirasi bagi perempuan di Desa Ngudikan untuk lebih memberanikan diri dalam menguaktualisasikan diri dalam kegiatan berorganisasi di luar rumah. Sekaligus mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah setempat dalam melakukan kebijakan bagi masyarakat.